

## Persepsi dan Implikasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus di Kelurahan Sodohoa, Kendari

Intan Rahayu<sup>1</sup>, Syamsul Alam<sup>2</sup>, Muh Nasir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Halu Oleo

Intanrahayu1962@gmail.com

\*Email Korespondensi: Intanrahayu1962@gmail.com

### Abstract:

**Abstract:** *This research aims to analyze public perceptions of vote-buying in the 2024 General Election in Sodohoa Subdistrict, West Kendari District, Kendari City, using cognitive, affective, and conative approaches. This study employs a qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. A total of 15 informants from various backgrounds were selected through purposive sampling to provide their views on vote-buying practices. The research findings indicate that, from a cognitive aspect, the majority of the public is aware of the existence of vote-buying in elections. In the affective aspect, most people hold negative views toward vote-buying, although some individuals express that the money helps meet their economic needs. In the conative aspect, those who accept the money tend to support the candidates who give it, although some reject it on moral grounds. This research shows that vote-buying still influences the electoral process, and more decisive measures are needed to reduce this practice in the future.*

**Keywords:** *Perception, Vote-Buying, Election, Cognitive, Affective, Conative*

### Abstrak

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai politik uang dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan pendekatan kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 15 informan dari berbagai latar belakang dipilih secara purposive sampling untuk memberikan pandangan mereka terkait praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kognitif, mayoritas masyarakat menyadari keberadaan politik uang dalam pemilihan umum. Pada aspek afektif, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap politik uang, meskipun beberapa individu menyatakan bahwa uang tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada aspek konatif, masyarakat yang menerima uang cenderung mendukung calon yang memberikan uang, meskipun ada juga yang menolak berdasarkan alasan moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang masih mempengaruhi proses pemilu, dan diperlukan langkah-langkah lebih tegas untuk mengurangi praktik ini di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Persepsi, Politik Uang, Pemilu, Kognitif, Afektif, Konatif

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Di Indonesia, Pemilu menjadi sarana utama dalam memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, seiring dengan

perkembangan demokrasi, praktik politik uang (money politics) semakin marak terjadi. Politik uang merujuk pada pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka (Aspinall & Sukmajati, 2015). Meskipun praktik ini secara hukum dilarang, politik uang tetap menjadi bagian dari dinamika pemilu di Indonesia.

Politik uang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi karena dapat merusak proses pemilihan yang adil dan jujur. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa politik uang sering kali memengaruhi keputusan pemilih, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah (Rosyad, 2021). Namun, pemahaman masyarakat tentang politik uang bisa berbeda-beda, tergantung pada aspek kognitif, afektif, dan konatif mereka. Persepsi kognitif melibatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik ini, afektif merujuk pada perasaan dan sikap mereka terhadap politik uang, sementara konatif menyangkut kecenderungan untuk menerima atau menolak uang tersebut dan dampaknya terhadap perilaku memilih (Ahmadi, 2020).

Pemilu adalah ekspresi mendasar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, berpendapat, dan berserikat. Melalui pemilu, warga negara membatasi kekuasaan pemerintah, memastikan setiap pemilih dapat menggunakan kebebasannya tanpa intimidasi atau penipuan yang mengganggu kebebasannya (Sharma, 2004: 87). Dalam masyarakat kapitalis, uang dapat menciptakan karisma bagi para kandidat dan mempengaruhi hak pilih masyarakat (Rosyad, 2021).

Slamento dalam skripsi Handayani (2013: 12) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan-nya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk (2019), setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
2. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra – indra yang dimilikinya.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang politik uang di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana masyarakat di tingkat lokal, seperti di Kelurahan Sodohoa, melihat dan merespons politik uang dalam Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji persepsi masyarakat mengenai politik uang berdasarkan tiga aspek utama: kognitif, afektif, dan konatif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan yang tinggal di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana politik uang dipersepsikan di tingkat lokal serta implikasinya terhadap integritas pemilu.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilu 2024 (Creswell, 2014). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena politik uang di masyarakat secara rinci berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Lokasi ini dipilih karena adanya variasi dalam praktik politik uang selama Pemilu, yang menjadikannya area yang relevan untuk penelitian mengenai persepsi masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2015). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Patton, 2002). Sebanyak 15 informan diikutsertakan, termasuk pemilih aktif dan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama masa kampanye dan pemilihan untuk memantau langsung perilaku masyarakat terkait politik uang (Moleong, 2012). Dokumentasi berupa catatan dari media lokal dan laporan pemilu juga digunakan untuk memperkuat data wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh ( Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat mengenai politik uang dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Sodohoa dengan fokus pada tiga aspek: kognitif, afektif, dan konatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang dipilih secara purposive. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan beberapa temuan utama yang diuraikan sebagai berikut.

Pemilihan Umum telah sukses dilaksanakan secara serentak pada Hari Rabu, 14 Februari 2024, Pemilihan umum yaitu pemilihan Presiden/ wakil presiden, DPD, DPR, dan anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kota. Penulis memberikan data hasil hitung suara pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD Kota/Kabupaten Kendari 2024.

Gambar  
Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DRD Kota/Kabupaten Kendari 2024



Versi: 16 Feb 2024 22:57:21 Progress: 82 dari 236 TPS (34.75%)

sumber: *TribunnewsSultra.com*

Berdasarkan keputusan KPU Kota Kendari Nomor 88 Tahun 2024 itu berikut ini redaksi merinci perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2024 untuk tingkat Kota Kendari.

Dari hasil rekapitulasi itu diketahui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar dengan masing-masing perolehan alokasi 6 kursi. Partai Nasdem, PDI Perjuangan masing-masing memperoleh 5 alokasi kursi. Selanjutnya Partai Demokrat dengan alokasi 4 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi, Gerindra 2 kursi, partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi. Kota Kendari 2 (Dapil Kendari Dan Kendari Barat).

Berdasarkan rekapitulasi data pada Dapil Kendari Dan Kendari Barat. Yang disusul pada urutan pertama di duduki oleh Partai Golkar dengan jumlah perolehan suara 8.052. Pada urutan ke-2 di duduki oleh Partai Gerindra dengan jumlah perolehan suara 7.650. Pada urutan ke-3 di duduki oleh Partai PAN dengan jumlah perolehan suara 7.333. Sedangkan Pada urutan ke-4 di duduki oleh Partai Gerindra dengan jumlah perolehan suara 4.338.

Berikut nama-nama anggota DPRD Kota Kendari periode 2024-2029 dengan perolehan jumlah suara terbanyak untuk Dapil Kota Kendari 2 (Kendari-Kendari Barat)

1. La Ode Azhar dengan jumlah suara caleg 4.653 (Golkar: 8.052)
2. La Ami dengan jumlah suara caleg 2.653 (Nasdem 6.650)
3. M. Syaifullah Usman dengan jumlah suara caleg 3.799 (PAN :7.333)
4. Amiruddin dengan jumlah suara caleg 1.651 (Gerindra: 4.338)
5. Ishak Ismail dengan jumlah suara caleg 3.646 (PDIP: 4.080)
6. Fitri Yanti Rifai dengan jumlah suara caleg 2.846 (PKS :3.710)
7. La Ode Alimin dengan jumlah suara caleg 2.520 (Demokrat: 2.896)

Sumber: halosultra.com pada 4 Maret 2024

### **Aspek Kognitif: Pengetahuan Masyarakat tentang Politik Uang**

Mayoritas informan memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu politik uang. Sebanyak 12 dari 15 informan mengetahui bahwa praktik ini merupakan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Informan menyatakan bahwa politik uang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilu di wilayah mereka. Salah seorang informan menyebutkan,

*"Kami sudah biasa dengan politik uang, hampir setiap pemilu, ada calon yang memberikan uang atau sembako" (Wawancara, 20 Februari 2024).*

Hasil ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Sukmajati (2015), yang menyatakan bahwa politik uang merupakan praktik umum dalam sistem pemilu di Indonesia.

### **Aspek Afektif: Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang**

Meskipun mayoritas masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan tindakan yang tidak etis, hasil wawancara menunjukkan adanya dualitas sikap di antara masyarakat. Sebanyak 9 informan mengekspresikan sikap negatif terhadap politik uang, menganggapnya sebagai bentuk korupsi yang merusak demokrasi. Salah seorang informan mengatakan,

*"Saya merasa politik uang merugikan karena kita akhirnya memilih bukan berdasarkan kualitas calon, tapi karena uang yang mereka berikan" (Wawancara, 24 Februari 2024).*

Namun, terdapat juga informan yang melihat politik uang sebagai bantuan ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 6 informan menyatakan bahwa mereka menerima uang politik karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*"Kami terima uangnya karena memang membantu, tapi soal memilih, itu urusan nanti" (Wawancara, 26 Februari 2024).*

Sikap ambivalen ini juga didukung oleh penelitian Rosyad (2021) yang menunjukkan bahwa politik uang sering kali dilihat sebagai solusi sementara bagi kebutuhan ekonomi masyarakat.

### **Aspek Konatif: Tindakan Masyarakat terhadap Politik Uang**

Pada aspek konatif, ditemukan bahwa politik uang mempengaruhi tindakan memilih sebagian masyarakat. Sebanyak 8 informan mengaku memilih calon yang memberikan uang atau barang.

*"Kami pilih mereka yang memberikan bantuan, karena kalau tidak, siapa lagi yang akan membantu kami" (Wawancara, 26 Februari 2024).*

Di sisi lain, 7 informan menolak untuk memilih calon yang memberi uang, dengan alasan ingin memilih berdasarkan hati nurani.

*"Saya tolak uangnya, saya ingin memilih berdasarkan kemampuan calon, bukan karena uang" (Wawancara, 24 Februari 2024).*

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat sadar bahwa politik uang salah secara moral, mereka masih terpengaruh oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ini sejalan dengan teori konatif yang menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh kebutuhan praktis dan kondisi sosial-ekonomi (Ahmadi, 2020).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang diterima oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Sodohoa, meskipun sebagian dari mereka menyadari dampak negatifnya terhadap demokrasi. Persepsi masyarakat terhadap politik uang dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang praktik ini (aspek kognitif), sikap mereka terhadap praktik tersebut (aspek afektif), dan tindakan yang mereka ambil saat menghadapi politik uang (aspek konatif).

Pada aspek kognitif, hasil menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat memahami bahwa politik uang adalah praktik yang ilegal dan tidak etis. Namun, pemahaman ini tidak selalu diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan yang sesuai. Pada aspek afektif, sikap masyarakat terbelah antara mereka yang menolak politik uang karena alasan moral, dan mereka yang menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi. Sikap ambivalen ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap politik uang, sebagaimana diungkapkan oleh Rosyad (2021).

Pada aspek konatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menerima uang politik cenderung memilih calon yang memberikan uang. Ini sejalan dengan teori konatif yang menunjukkan bahwa perilaku manusia, termasuk dalam konteks pemilu, sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti insentif ekonomi (Ahmadi, 2020). Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menolak politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani, menunjukkan bahwa ada resistensi moral terhadap praktik ini.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, perlunya edukasi masyarakat yang lebih intensif mengenai dampak negatif politik uang terhadap integritas demokrasi. Kedua, pentingnya peran pemerintah dan lembaga pengawas pemilu dalam memperketat pengawasan dan penegakan hukum terkait politik uang. Ketiga, dibutuhkan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena politik uang sering kali diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang rentan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai politik uang dalam Pemilihan Umum 2024, dengan menelaah aspek kognitif, afektif, dan konatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Sodohoa memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik politik uang. Masyarakat memahami bahwa politik uang adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip demokrasi (aspek kognitif). Namun, di sisi afektif, masyarakat menunjukkan dualitas

sikap; sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada aspek konatif, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang menerima uang dari calon politik cenderung memberikan dukungan kepada calon tersebut, meskipun ada juga masyarakat yang tetap memilih berdasarkan hati nurani.

Politik uang masih menjadi masalah serius dalam pemilihan umum di tingkat lokal, dengan alasan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori konatif yang menyatakan bahwa perilaku manusia sering kali dipengaruhi oleh insentif eksternal, terutama dalam konteks pemilu (Ahmadi, 2020). Temuan ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Aspinall dan Sukmajati (2015), yang menunjukkan bahwa politik uang masih lazim dalam sistem pemilu di Indonesia

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori persepsi yang menyatakan bahwa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (konatif) saling terkait dalam membentuk perilaku masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur politik uang di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu lokal, dengan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat memengaruhi penerimaan terhadap politik uang.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa perlunya edukasi politik yang lebih intensif di masyarakat untuk menekankan dampak negatif dari politik uang terhadap proses demokrasi. Selain itu, pemerintah dan lembaga pengawas pemilu harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta mengimplementasikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku politik uang. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap insentif finansial dari calon politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2020). Psikologi sosial. Rineka Cipta.
- Amrin Wou. (n.d.). Persepsi masyarakat terhadap politik uang (money politic) dalam setiap pesta demokrasi di Kampung Soryar. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 3(1), 188-189.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu 2014*. Penerbit PolGov.
- Bilu, L., & Tunda, A. (2023). Dampak kebijakan dalam jaringan terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 6(2), 693-701.
- Harjudin, L. (2020). Dilema penanganan COVID-19: Antara legitimasi pemerintah dan kepatuhan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, ISSN 2716-3857.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis evaluasi badan penyelenggara ad hoc pemilihan umum 2019 di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131.
- Napitupulu, H. N. M., & Sagala, A. I. (2019). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1).

- Pratiwi, E., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2019). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap penerapan program kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1).
- Rosyad, S. (2021). Praktik money politics dalam perspektif sosio legal normatif. PT Nasya Expanding Management.
- Sharma, P. (2004). Sistem demokrasi yang hakiki. Yayasan Menara Ilmu.
- Slameto. (2003). Belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Rineka Cipta.
- Suaib, E., La Ode Mustafa, R., & Iskandar, N. (2023). Analisis kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1-12.
- Sharma, P. (2004). Sistem demokrasi yang hakiki. Yayasan Menara Ilmu.
- Slameto. (2003). Belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Rineka Cipta.
- Suaib, E., La Ode Mustafa, R., & Iskandar, N. (2023). Analisis kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1-12.